



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Agus Harimurti Yudhoyono
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 30 Januari 2026

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan


Agus Harimurti Yudhoyono

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**


TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
Tujuan 1: Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkeadilan		Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI)		21,6%
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak	IKSS.1.1	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,56
		IKSS.1.2	Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	47%
		IKSS.1.3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	68,75%
		IKSS.1.4	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	57,7%
Tujuan 2: Penguatan Kelembagaan dan Peran koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		94%
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,2

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik	IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	>90

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp166.879.741.000,00
2	RO Khusus Dukungan Manajemen	Rp22.732.740.000,00
3	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp40.544.611.000,00
4	RO Khusus Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp32.400.279.000,00
JUMLAH ANGGARAN TOTAL		Rp262.557.371.000,00
JUMLAH ANGGARAN EFEKTIF *)		Rp207.424.352.000,00

*) Jumlah Anggaran Efektif Adalah Jumlah Anggaran Total Dikurangi Anggaran RO Khusus

Jakarta, 30 Januari 2026
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur
dan Pembangunan Kewilayahan


Agus Harimurti Yudhoyono

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN


INDIKATOR KINERJA		PENJELASAN/ RINCIAN KINERJA	JADWAL KELUARAN (TRIWULAN)			
			I	II	III	IV
Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia		Kontribusi PDRB Kawasan Timur terhadap PDRB Nasional.				✓
IKSS.1.1	Indeks Ketahanan Air Nasional	Keterpenuhan Kebutuhan Air yang Layak dan Berkelanjutan untuk Kehidupan dan Pembangunan Serta Terkelolanya Risiko yang Berkaitan dengan Air				✓
IKSS.1.2	Stok Infrastruktur terhadap PDB	Keseluruhan Aset Infrastruktur yang Tersedia dan Berfungsi di Indonesia dalam Periode Tertentu				✓
IKSS.1.3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian yang Memenuhi Kriteria Kelayakan dan Dapat Dijangkau secara Ekonomi.				✓
IKSS.1.4	Proporsi PDRB Perkotaan Terhadap PDB Nasional	Besarnya Kontribusi Sektor Perkotaan dalam Perekonomian Nasional				✓
Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan Program Pembangunan yang Dilaksanakan oleh Berbagai Instansi Terkait dalam Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan				✓
IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian <i>Integrated Land Administration and Spatial Planning Project</i> (ILASPP)	✓	✓	✓	✓

INDIKATOR KINERJA		PENJELASAN/ RINCIAN KINERJA	JADWAL KELUARAN (TRIWULAN)			
			I	II	III	IV
Pembangunan Kewilayahan		2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Percepatan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi Lebih Muatan/ <i>Over Dimension Over Loading</i> (ODOL)	✓	✓	✓	✓
		3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pengembangan Jaringan Pelabuhan dan Bandara Terpadu	✓	✓	✓	✓
		4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen untuk Mendukung Satuan Pendidikan	✓	✓	✓	✓
		5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Peningkatan Nilai Indeks Pertanaman Nasional berdasarkan Volume Layanan Irigasi	✓	✓	✓	✓
		6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyediaan Hunian bagi Masyarakat dengan Keterbatasan Daya Beli (MKDB) dan Masyarakat Terdampak Bencana	✓	✓	✓	✓
		7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyelesaian Pembangunan Hunian serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk Kawasan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	✓	✓	✓	✓
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Hasil Pengukuran Tingkat Kepuasan Kementerian/ Lembaga/ <i>Stakeholders</i> terhadap Pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya untuk Berkoordinasi dan Bersinergi	✓	✓

INDIKATOR KINERJA		PENJELASAN/ RINCIAN KINERJA	JADWAL KELUARAN (TRIWULAN)			
			I	II	III	IV
IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025				✓

Jakarta, 30 Januari 2026

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan


Agus Harimurti Yudhoyono